

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (21), dan pasal 23 ayat (11) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 Tahun 1998 (BN No.6239 haf. 8B) tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 No.448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No.9 Tahun 1968 (BN No.1721 haf. 7A-9A) tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (LN Tahun 1968 No.53, TLN No.28601);
4. Undang-undang No.5 Tahun 1973 (BN No.2424 haf. 1B-7B) tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN Tahun 1973 No.39, TLN No.3010);
5. Undang-undang No.3 Tahun 1998 (BN No.6150 haf. 1B-7B) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (LN Tahun 1998 No.66, TLN No.3750) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No.32 Tahun 1999 (BN No.6361 haf. 1B-5B) tentang Perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1998 (BN No.6266 hal, 4B-8b) (LN Tahun 1999 No.144, TLN No.3876);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas ;
 - a. Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga iuta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan sebesar Rp 51.106.703.130.810,00 (lima puluh satu triliun seratus enam miliar tujuh ratus tiga iuta seratus tiga puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp 158.042.453.393.414,00 (seratus lima puluh delapan triliun empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga iuta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas;
 - a. Penerimaan pajak sebesar Rp 102.394.445.611.426,00 (seratus dua triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh lima iuta enam ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam Rp 41.368.337.491.227,00 (empat puluh satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh tuiuh rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.279.670.290.761,00 (empat belas triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh iuta dua ratus sembilan puluh ribu tuiuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Rincian pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:

a. Pengeluaran rutin sebesar Rp 136.086.962.052.249.00 (seratus tiga puluh enam triliun delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri	Rp	76.071.102.723,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan	Rp	611.303.021.068,00
03 Sektor pengairan	Rp	34.303.170.112,00
04 Sektor tenaga kerja	Rp	300.369.935.110,00
05 Sektor perdagangan. Pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi	Rp	97.632.233.514.009,00
06 Sektor transportasi. Meteorologi dan geofisika	Rp	352.116.922.434,00
07 Sektor pertambangan dan energi	Rp	313.388.018.059,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp	95.251.604.982,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp	13.125.636.564.808,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp	244.951.699.001,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp	5.445.119.974.109,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp	349.059.261.076,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp	712.274.145.060,00
14 Sektor perumahan dan permukiman	Rp	17.900.291.191,00
15 Sektor agama	Rp	1.386.529.226.73,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp	389.497.636.561,00
17 Sektor hukum	Rp	759.927.712.000,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan	Rp	4.069.534.341.661,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi, dan media massa	Rp	1.991.373.430.612,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan	Rp	8.174.113.665.000,00

b. Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 66.628.839.579.744.00 (enam puluh enam triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dirinci menurut sektor

01 Sektor industri	Rp	197.420.191.572,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan	Rp	4.757.826.140.539,00
03 Sektor pengairan	Rp	3.574.815.051.629,00
04 Sektor tenaga kerja	Rp	1.164.861.725.741,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi	Rp	9.928.676.605.013,00
06 Sektor transportasi. Meteorologi dan geofisika	Rp	6.942.861.026.269,00
07 Sektor pertambangan dan energi	Rp	7.845.417.576.713,00
08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi	Rp	1.820.770.321.597,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi	Rp	10.611.599.067.497,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang	Rp	761.395.433.094,00
11 Sektor pendidikan, Kebudayaan Nasional, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	Rp	6.726.083.220.155,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	Rp	598.436.962.149,00
13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja	Rp	3.790.007.930.016,00
14 Sektor perumahan dan permukiman	Rp	2.006.852.164.771,00
15 Sektor agama	Rp	396.577.233.047,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi	Rp	762.755.810.658,00
17 Sektor hukum	Rp	136.259.859.865,00
18 Sektor aparaturnegara dan pengawasan	Rp	1.292.386.475.688,00
19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa	Rp	423.272.284.718,00
20 Sektor pertahanan dan keamanan	Rp	2.890.564.499.013,00

(2) Rincian Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tersebut dalam penjelasan pasal ini.

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran '998/'999 adalah sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 132

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999

I. UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggung-jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. Perhitungan Anggaran ini merupakan tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara yang senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat TAP MPR-RI Nomor XII/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut terdapat Sisa Anggaran lebih sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat iuta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Sisa Anggaran lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp 6.317.742.480,989,00 (enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ru piah).

Sisa Anggaran lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi sebesar Rp 12.751,097.373.220,00 (dua belas triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah). Jumlah Sisa Anggaran lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730,000.000, 000,00 {satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

Sehubungan dengan koreksi/kontra pos Perhitungan Anggaran Negara {PANI mengenai penerimaan bantuan program telah sesuai dengan Standar Akuntansi dan tidak bertentangan dengan Sistim Dasar Kas (Cash Basis).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Penerimaan pembangunan tersebut terdiri dari bantuan program dan bantuan proyek.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rincian pendapatan negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENERIMAAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Penerimaan perpajakan	Rp	102.394.445.611.426,00
0110 Pajak penghasilan (PPh)	Rp	55.944.265.167.579,00
0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan paiaik penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	Rp	27.803.179.194.657,00
0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)	Rp	3.565.279.217.833,00
0210 Bea masuk	Rp	2.305.613.687.614,00
0220 Cukai	Rp	7.732.942.664.594,00
0230 Pungutan (paiaik) ekspor	Rp	4.630.150.818.856,00
0240 Bea meterai	Rp	413.014.860.293,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam	Rp	41.368.337.491.227,00
0310 Penerimaan minyak bumi	Rp	25.957.441.440.987,00
0320 Penerimaan gas alam	Rp	15.410.896.050.240,00
Penerimaan negara bukan pajak	Rp	14.279.670.290.761,00
0410 Pendapatan pendidikan	Rp	71.366.158.941,00
0411 Uang pendidikan	Rp	66.361.409.433,00
0412 Uang uiaan rnasuk. Kenaikan tingkat dan akhir pendidikan	Rp	3.634.258.261,00
0419 Penerimaan pendidikan lainnya	Rp	1.370.491.247,00
0480 Pendapatan pendidikan swadana	Rp	530.353.954.568,00
0481 Pendapatan pendidikan swadana	Rp	530.353.954.568,00

0510	Penjualan hasil produksi. sitaan	Rp	32.442.264.280,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	Rp	176.374.120,00
0512	Penjualan hasil peternakan	Rp	188.137.605,00
0513	Penjualan hasil perikanan	Rp	47.799.807,00
0514	Penjualan hasil sitaan	Rp	6.794.034.497,00
0515	Penjualan obat.obatan dan hasil farmasi lainnya	Rp	419.498.176,00
0516	Penjualan penerbitan. film, dan hasil cetakan lainnya	Rp	130.277.905,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	Rp	11.077.871.989,00
0519	Penjualan lainnya	Rp	13.608.270.181,00
0520	Penjualan aset tetap	Rp	31.230.295.445,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah	Rp	3.911.707.230,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	Rp	1.769.031.169,00
0523	Penjualan sewa beli	Rp	21.901.698.067,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih rusak, dihapuskan	Rp	3.647.858.979,00
0530	Pendapatan sewa	Rp	9.587.397.772,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	Rp	4.727.025.393,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	Rp	2.487.143.879,00
0533	Sewa benda.benda bergerak	Rp	1.650.729.946,00
0539	Sewa benda.benda tak bergerak lainnya	Rp	722.498.554,00
0540	Pendapatan jasa I	Rp	693.451.832.019,00
0541	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	Rp	17.070.596.802,00
0542	Pendapatan tempat hiburan, taman, rnuseum	Rp	427.781.185,00
0543	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK,BPKB	Rp	167.655.322.683,00
0544	Pendapatan jasa pertanahan	Rp	141.456.995.058,00
0545	Pendapatan hak dan perijinan	Rp	309.928.796.891,00
0546	Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	Rp	3.547.311.630,00
0547	Pendapatan jasa tenaga., jasa pekerja	Rp	8.545.338.137,00
0548	Pendapatan jasa kantor urusan agarna	Rp	5.668.040.399,00
0549	Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan	Rp	39.151.649.234,00
0550	Pendapatan jasa II	Rp	948.467.661.242,00
0551	Pendapatan jasa lernbaga keuangan (jasa giro)	Rp	146.254.992.066,00
0552	Pendapatan iuran hasil hutan, hasii laut, royalti dan denda	Rp	402.028.486.443,00
0553	Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin	Rp	4.807.390.868,00
0554	Pendapatan jasa kantor catatan sipil	Rp	6.333.186.708,00
0555	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	Rp	2.034.974.283,00
0556	Pendapatan uang pewarganegaraan	Rp	3.662.149.830,00
0557	Bea lelang	Rp	52.042.579.666,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	Rp	39.909.468.265,00
0559	Pendapatan jasa lainnya	Rp	291.394.433.113,00
0560	Pendapatan rutin dari luar negeri	Rp	57.388.840.455,00
0561	Bea visa dan paspor	Rp	30.395.000,00
0562	Bea konsuler	-	-
0563	Bea maritim	-	-
0566	Bea legalisasi surat-surat perdagangan	-	-
0569	Penerimaan rutin luar negeri lainnya	Rp	57.358.445.455,00
0580	Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana	Rp	1.922.781.704.615,00
0581	Pendapatan penjualan swadana	Rp	6.544.280.377,00
0582	Pendapatan sewa swadana	Rp	1.232.663.671,00
0583	Pendapatan iasa swadana	Rp	1.915.004.760.567,00
0610	Pendapatan keiaksanaan dan peradilan	Rp	31.504.709.643,00
0611	Legalisasi tanda tangan	Rp	62.052.303,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	Rp	15.300.950,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	Rp	399.443.194,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	Rp	14.976.903.609,00
0615	Ongkos perkara	Rp	1.229.404.419,00
0619	Penerimaan kejaksanaan dan peradilan lainnya	Rp	14.821.605.168,00
0710	Pendapatan dari investasi	Rp	6.263.902.109.063,00
0711	Bagian laba dari BUMN	Rp	3.428.262.277.194,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	Rp	2.835.639.831.869,00
0810	Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan	Rp	147.157.184.645,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	28.092.152.205,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonomi	Rp	6.533.807.340,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	50.028.025.827,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	46.442.739.671,00

0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp	16.023.673.602,00
0816	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	36.750.000,00
0817	Pembetulan pembukuan bea masuk	Rp	36.000,00
0820	Pendapatan kembali belanja, tahun anggaran yang lalu	Rp	34.798.536.074,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	Rp	5.837.890.338,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	Rp	2.092.032.876,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun	Rp	4.809.182.599,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	Rp	6.026.588.464,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	Rp	16.026.357.260,00
0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh	Rp	6.484.537,00
0880	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	7.191.135.360,00
0881	Pendapatan lain-lain swadana	Rp	7.191.235.360,00
0890	Pendapatan lain-lain	Rp	3.498.046.406.639,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	Rp	4.812.166.886,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Rp	22.565.889.647,00
0893	Penerimaan kembali. ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara	Rp	5.702.588.689,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPH nihil KPKN	Rp	124.328.234.484,00
0895	Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN	Rp	1.633.978.933.591,00
0899	Pendapatan anggaran lainnya	Rp	1.706.658.593.342,00
	J U M L A H	Rp	158.042.453.393.414,00

RINCIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

0910	Bantuan Program	Rp	24.925.721.020.599,00
0920	Bantuan Proyek	Rp	26.180.982.110.211,00
	J U M L A H	Rp	51.106.703.130.810,00

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rincian belanja negara dimaksud adalah sebagai berikut:

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999

01	Sektor Industri		
01.1	Subsektor Industri	Rp	76.077.102.723,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	76.077.102.723,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	207.945.019.540,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	409.358.001.528,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp	617.303.021.068,00
03	Sektor Pengairan		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	14.890.733.552,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	19.412.436.560,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	34.303.170.112,00
04	Sektor Tenaga Kerja		
04.1	Subsektor tenaga kerja	Rp	300.369.935.110,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	300.369.935.110,00
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	70.436.301.613,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	48.249.634.033,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	97.408.692.311.765,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	104.855326.598,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi	Rp	97.632.233.574.009,00
06	Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	25.760.722.360,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	27.787.001.981,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	174.990.500.495,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	61.899.041.715,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	61.679.655.883,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika	Rp	352.116.922.434,00
07	Sektor Pertambangan dan Energi		
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	308.142.157.955,00
07.1	Subsektor Energi	Rp	5.245.920.104,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	313.388.078.059,00

08	Sektor Pariwisata, POS, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	22.486.159.259,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	72.765.445.723,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	95.251.604.982,00
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	13.047.354.872.701,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	78.281.692.307,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	13.125.636.564.808,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	9.492.872.682,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	235.458.826.319,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	244.951.699.001,00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olahraga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	4.951.274.837.578,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan	Rp	383.475.564.149,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	100.561.144.359,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olahraga	Rp	9.808.428.023,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	Rp	5.445.119.974.109,00
12	Sektor Kependudukan dan keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	349.059.261.076,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	136.336.950.415,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	575.937.194.645,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	Rp	712.274.145.060,00
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	12.518.233.256,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	5.382.057.935,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	17.900.291.191,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	242.417.318.611,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	1.144.112.604.062,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	1.386.529.922.673,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	238.752.519.572,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	37.610.961.991,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	2.483.783.381,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	110.650.371.617,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	389.497.636.561,00
17	Sektor Hukum		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	651.537.721.619,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	108.389.990.381,00
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	759.927.712.000,00
18	Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	3.759.597.862.042,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	309.936.479.619,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	4.069.534.341.661,00
19	Sektor Popolitik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa		
19.1	Subsektor Politik	Rp	98.098.981.874,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	1.337.049.915.104,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	556.224.533.634,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	Rp	1.991.373.430.612,00
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan		
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Rp	8.174.113.665.000,00
20.3	Subsektor Pendukung		
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	8.174.113.665.000,00
	J U M L A H	Rp	136.086.962.052.249,00

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TANPA BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN
1998/ 1999

01	Sektor Industri		
01.1	Subsektor Industri	Rp	165.450.355.086,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	165.450.355.086,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	4.056.955.222.109,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	314.546.403.413,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp	4.371.501.625.522,00
03	Sektor Pengairan		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	283.023.101.687,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	988.802.263.345,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	1.271.825.365.032,00
04	Sektor Tenaga Kerja		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	1.081.655.931.433,00
	Jumlah Sektor Tenaga Kerja	Rp	1.081.655.931.433,00
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	15.358.190.987,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	48.104.863.791,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional	Rp	330.740.717.702,00
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	8.390.620.645.512,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	190.754.481.336,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi	Rp	8.975.578.899.328,00
06	Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	2.783.373.136.654,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	279.197.948.713,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	155.682.512.114,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	123.465.727.730,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	15.232.188.450,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi. dan Geofisika	Rp	3.356.951.513661,00
07	Sektor Pertambangan dan Energi		
07.1	Subsektor Pertambangan	Rp	49.122.395.603,00
07.2	Subsektor Energi	Rp	756.030.444.679,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	805.152.840.282,00
08	Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata	Rp	46.832.494.988,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	6.890.474.890,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi	Rp	53.722.969.878,00
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	8.567.977.302.064,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Rp	858.711.118.003,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	Rp	9.426.688.420.067,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	270.475.564.268,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	54.807.072.928,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	325.282.637.196,00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olahraga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	4.250.189.511.182,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	175.291.322.946,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	73.677.855.748,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	68.206.408.142,00
	Jumlah Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah Raga	Rp	4.567.365.098.108,00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	235.348.875.658,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp	235.348.875.658,00
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita Anak, dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	872.831.563.279,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.207.969.625.018,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp	417.501.692.808,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan,		

	Peranan Wanita Anak dan Remaja	Rp	2.498.302.881.105,00
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	801.531.424.346,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	9.119.074.051,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	810.650.498.397,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	26.852.522.982,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	236.149.594.849,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	263.002.117.381,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	129.654.632.625,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	53.175.041.011,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	67.705.196.232,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	62.681.778.215,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	28.088.176.657,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	92.340.508.153,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	433.645.332.893,00
17	Sektor Hukum		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	Rp	7.522.387.811,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	35.610.802.320,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	Rp	93.111.869.734,00
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	136.245.059.865,00
18	Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	397.434.735.748,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	16.361.288.921,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	413.796.024.669,00
19	Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa		
19.1	Subsektor Politik	Rp	9.688.851.526,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	Rp	11.047.543.500,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	88.704.585.987,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	Rp	109.440.981.013,00
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan		
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	Rp	2.585.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	Rp	884.249.446.449,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	259.415.596.150,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	1.146.250.042.599,00
	J U M L A H	Rp	40.447.857.469.533,00

RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN BANTUAN PROYEK/TEKNIS TAHUN ANGGARAN 1998/1999

01	Sektor Industri		
01.1	Subsektor Industri	Rp	31.969.836.486,00
	Jumlah Sektor Industri	Rp	31.969.836.486,00
02	Sektor Pertanian dan Kehutanan		
02.1	Subsektor Pertanian	Rp	370.003.487.092,00
02.2	Subsektor Kehutanan	Rp	16.321.027.925,00
	Jumlah Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp	386.324.515.017,00
03	Sektor Pengairan		
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	Rp	1.774.316.004.256,00
03.2	Subsektor Irigasi	Rp	528.673.682.341,00
	Jumlah Sektor Pengairan	Rp	2.302.989.686.597,00
04	Sektor Tenaga Kerja		
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	Rp	83.205.794.308,00
	Jumlah Sektoral Tenaga Kerja	Rp	83.205.794.308,00
05	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi		
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	Rp	1.972.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	Rp	5.306.320.724,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional		
05.4	Subsektor Keuangan	Rp	885.441.083.586,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	Rp	62.348.329.375,00
	Jumlah Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan, dan Koperasi	Rp	953.097.705.685,00

06	Sektor Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika		
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	Rp	1.676.732.623.429,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	Rp	837.778.301.885,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	Rp	893.814.259.440,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	Rp	150.464.322.580,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	Rp	27.120.005.274,00
	Jumlah Sektor Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	Rp	3.585.909.512.608,00
07	Sektor Pertambangan dan Energi		
07.1	Subsektor Pertambangan		
07.2	Subsektor Energi	Rp	7.040.264.736.431,00
	Jumlah Sektor Pertambangan dan Energi	Rp	7.040.264.736.431,00
08	Sektor Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi		
08.1	Subsektor Pariwisata		
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	Rp	1.767.047.351.719,00
	Jumlah Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Rp	1.767.047.351.719,00
09	Sektor Pembangunan Daerah dan Trasmigrasi		
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	Rp	1.162.242.110.021,00
09.2	Subsektor Trasmigrasi dan Permukiman Perambahan Hutan	Rp	22.668.537.409,00
	Jumlah Sektor Pembangunan Daerah dan Trasmigrasi	Rp	1.184.910.647.430,00
10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang		
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	Rp	300.148.681.806,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	Rp	135.964.114.092,00
	Jumlah Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp	436.112.795.898,00
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olahraga		
11.1	Subsektor Pendidikan	Rp	2.096.855.473.798,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	Rp	61.151.467.648,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Rp	7.320.475,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	Rp	703.860.216,00
	Jumlah Sektor Pendidikan Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda, dan Olah raga	Rp	2.158.718.122.137,00
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera		
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rp	363.081.086.491,00
	Jumlah Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp	363.088.086.491,00
13	Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja		
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	Rp	133.834.235.359,00
13.2	Subsektor Kesehatan	Rp	1.157.855.813.552,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp	15.000.000,00
	Jumlah Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak, dan Remaja	Rp	1.291.705.048.911,00
14	Sektor Perumahan dan Permukiman		
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	Rp	1.181.786.043.565,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	Rp	14.415.622.809,00
	Jumlah Sektor Perumahan dan Permukiman	Rp	1.196.201.666.374,00
15	Sektor Agama		
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	Rp	118.271.545,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	Rp	133.456.843.671,00
	Jumlah Sektor Agama	Rp	133.575.115.216,00
16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	Rp	67.849.383.430,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	Rp	20.477.010.481,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	76.629.950.824,00
16.4	Subsektor Kelautan	Rp	124.370.509.515,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	Rp	32.341.584.070,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	Rp	7.442.039.445,00
	Jumlah Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Rp	329.110.477.765,00
17	Sektor Hukum		
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional		
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	Rp	14.800.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum		
	Jumlah Sektor Hukum	Rp	14.800.000,00
18	Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan		
18.1	Subsektor Aparatur Negara	Rp	791.517.870.331,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem		

	dan Pelaksanaan Pengawasan	Rp	87.072.580.688,00
	Jumlah Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan	Rp	878.590.451.019,00
19	Sektor Politik. Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa		
19.1	Subsektor Politik	Rp	2.849.833.,263,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri		
19.3	Subsektor Penerangan. Komunikasi dan Media Massa	Rp	310.981.470.442,00
	Jumlah Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	Rp	313.831.303.705,00
20	Sektor Pertahanan dan Keamanan		
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat		
20.2	Subsektor ABRI	Rp	1.603.049.023.183,00
20.3	Subsektor Pendukung	Rp	141.265.433.231,00
	Jumlah Sektor Pertahanan dan Keamanan	Rp	1.744.314.456.414,00
	J U M L A H	Rp	26.180.982.110.211,00

Pasal 3

Sisa Anggaran Lebih sebesar Rp 6.433.354.892.231,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) disebabkan oleh Realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp 209.149.156.524.224,00 (dua ratus sembilan triliun seratus empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh enam iuta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan Realisasi Belanja Negara sebesar Rp 202.715.801.631.993,00 (dua ratus dua triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Dalam Sisa Anggaran Lebih tersebut di atas termasuk jumlah koreksi BPK atas pengeluaran untuk subsidi pangan dan subsidi pupuk Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp 6.122.364.120.635,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang baru dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 1999/2000 setelah dilakukan audit oleh BPKP.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3990